

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG TAHUN 2023

¹⁾Adella Saputri*, ²⁾Isabella, ³⁾Sanny Nofrima

^{1), 2), 3)}Universitas Indo Global Mandiri

¹⁾adellasaputri2001@gmail.com, ²⁾isabella@uigm.ac.id, ³⁾sanny@uigm.ac.id

*adellasaputri2001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Gandus, Kota Palembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Kemudian hasil analisis dan temuan di lapangan dari penelitian ini menggunakan teori menurut David C Korten (1988), yang terdapat tiga indikator yaitu program, pemanfaat dan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT berhasil menyalurkan bantuan tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan identitas antara penerima dengan data Kementerian Sosial dan keluhan terkait jumlah bantuan yang dianggap kurang serta harga pangan yang tidak sesuai dengan standar. BPNT memberikan kontribusi positif dalam menyejahterakan keluarga dengan penghasilan rendah, meskipun masih ada beberapa keluarga yang memerlukan perhatian lebih. Keputusan yang diambil oleh Kementerian Sosial dalam proses implementasi BPNT berjalan dengan baik, dengan Dinas Sosial berperan sebagai pengawas dan pengevaluasi program. Namun, diperlukan wewenang lebih luas untuk memudahkan penentuan penerima bantuan yang tepat. Keterbatasan dalam kapasitas organisasi Dinas Sosial menyebabkan adanya kesenjangan dalam sistem distribusi bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi dan validasi penerima bantuan oleh Dinas Sosial untuk memastikan program BPNT berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, implementasi BPNT di Kecamatan Gandus telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun masih perlu perbaikan dalam beberapa aspek agar bantuan dapat tersalurkan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Masyarakat

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing how the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Gandus District,

Palembang City in improving community welfare. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and questionnaires. Then the results of the analysis and findings in the field from this study use the theory according to David C Korten (1988), which has three indicators, namely the program, the beneficiary and the organisation. The results showed that the BPNT programme succeeded in delivering the assistance on time, in good condition, and in accordance with the promised amount. However, there are some obstacles such as differences in identity between recipients and Ministry of Social Affairs data and complaints regarding the amount of assistance that is considered insufficient and food prices that are not in accordance with standards. BPNT has made a positive contribution to the welfare of low-income families, although there are still some families who need more attention. Decisions made by the Ministry of Social Affairs in the BPNT implementation process have been good, with the Social Affairs Office playing the role of programme supervisor and evaluator. However, more authority is needed to facilitate the determination of the right beneficiaries. Limitations in the organisational capacity of Dinas Sosial have led to gaps in the benefit distribution system. Therefore, there is a need to strengthen the verification and validation of beneficiaries by the Social Agency to ensure that the BPNT programme is more effective and well-targeted. Overall, the implementation of BPNT in Gandus Sub-district has had a positive impact on improving the welfare of the poor, but it still needs improvement in several aspects so that assistance can be distributed more effectively and on target.

Keywords : *Implementation, Government, Community*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan permasalahan yang sangat krusial, salah satunya dampak ekonomi yang tidak stabil, salah satu cara utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat adalah dengan melihat kondisi ekonominya (D. C. Pratiwi & Imsar, 2022). Jika sebuah negara memiliki struktur ekonomi yang stabil dan pendapatan yang memadai, itu akan dianggap sebagai negara yang sejahtera. Garis kemiskinan dan jutaan orang tidak memiliki pekerjaan, negara tersebut tidak dapat dianggap sebagai negara yang Sejahtera (Arfah, 2020). Setiap negara menghadapi masalah penting yang disebut kemiskinan, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat menjadi penghambat bagi negara berkembang karena menyebabkan seseorang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan nutrisi yang layak, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (Lestari et al., 2023).

Mayoritas masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara miskin sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Akibatnya, pemerintah harus membuat kebijakan dan peraturan untuk mengatasi kemiskinan (Arifin et al., 2020).

Empat prinsip pokok dalam mengatasi kemiskinan secara menyeluruh digunakan untuk menangani masalah kemiskinan meliputi: (i) peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan sosial (ii) peningkatan akses ke layanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan (iv) pembangunan yang inklusif. Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, strategi penanggulangannya dilakukan dengan cara menurunkan biaya yang harus diemban oleh masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah ini diimplementasikan melalui berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti dukungan finansial, pemberdayaan komunitas, dan dukungan untuk usaha mikro atau kecil (Masnan & Nashir, 2020).

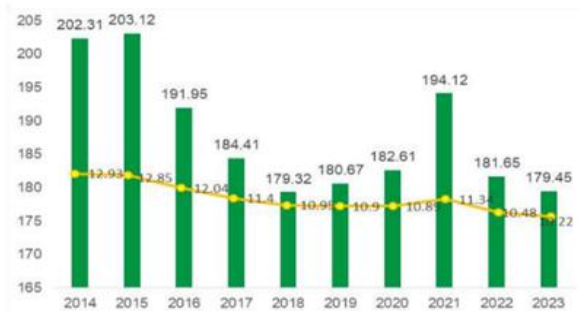
Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (R. Pratiwi et al., 2022). Implementasi program adalah komponen utama terhadap suatu kebijakan. Selain itu, implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan (Dwi & Adhi, 2019). Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan program itu sendiri (Andani et al., 2019)

Program BPNT dikoordinasikan oleh otoritas publik, untuk membangun kelangsungan hidup dan kecakapan, menargetkan penyaluran bantuan sosial dan memberdayakan penggabungan moneter. Untuk membantu pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Albades & Roza, 2023). Bantuan sosial pangan non tunai merupakan pendekatan baru dalam pendekatan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial pangan

nontunai yang merupakan inovasi penyediaan pangan nontunai yang banyak dilaksanakan di tingkat nasional. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (Fad²jaelani.nng@gmail.com lurrohimi et al., 2020).

Pada awalnya Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pengganti dari program sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera atau biasa yang disebut (RASTRA)(Mufatiroh et al., 2021). Kota Palembang adalah salah satu dari beberapa kota yang menerima bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Orang-orang yang terdaftar sebagai peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dan penerima bantuan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bagian dari program ini(Nurafia et al., 2020). Sistem tabungan dan dompet elektronik, juga dikenal sebagai "dompet elektronik", adalah fitur KKS elektronik yang memungkinkan KPM penerima manfaat membeli kebutuhan pokok dengan bantuan pembayaran sosial. Uang yang tidak digunakan secara otomatis disetorkan ke rekening dan dapat dihabiskan pada bulan selanjutnya.

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Palembang Maret 2014-2023



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2014 – 2023

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Badan Pusat Statistik Kota Palembang melaporkan penduduk miskin di kota Palembang mengalami penurunan tahunan yang konsisten, Namun dari dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 11,34% dari tahun 2020 yang juga mengalami kenaikan mencapai 1,94% dari tahun sebelumnya.

Adapun penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kota Palembang diberikan kepada penduduk miskin yang disalurkan melalui kartu elektronik berupa uang yang bisa diambil melalui Bank yang bekerja sama dengan Kementrian Sosial(Syaputra, 2023). Berikut ini penerima Bantuan Pangan Non Tunai di kota Palembang yakni:

**Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang
Tahun 2023**

Tahapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Tahap 1 (Januari-Februari)	51448/KK
Tahap 2 (Maret-April)	50903/KK
Tahap 3 (Mei-Juni)	50270/KK
Tahap 4 (Juli-Agustus)	49585/KK

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, 2023

Berdasarkan data diatas, data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per kartu keluarga dari Januari hingga Agustus menunjukkan pola penurunan yang konsisten setiap dua bulan. Pada Tahap 1 (Januari-Februari), terdapat 51.448 KPM, kemudian sedikit menurun menjadi 50.903 KPM pada Tahap 2 (Maret-April). Pola penurunan ini berlanjut dengan jumlah KPM menjadi 50.270 pada Tahap 3 (Mei-Juni). Penurunan berlanjut pada Tahap 4 (Juli-Agustus) dengan jumlah KPM mencapai 49.585.

**Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Gandus
Tahun 2023**

Tahapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Tahap 1 (Januari-Februari)	3659/KK
Tahap 2 (Maret-April)	3612/KK
Tahap 3 (Mei-Juni)	3561/KK
Tahap 4 (Juli-Agustus)	1547/KK

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, 2023

Berdasarkan data diatas, data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per kartu keluarga dari Januari hingga Agustus menunjukkan pola penurunan yang konsisten setiap dua bulan. Pada Tahap 1 (Januari-Februari), terdapat 3659 KPM, kemudian sedikit menurun menjadi 3612 KPM pada Tahap 2 (Maret-April). Pola penurunan ini berlanjut dengan jumlah KPM menjadi 3561 pada Tahap 3 (Mei-Juni). Penurunan signifikan terjadi pada Tahap 4 (Juli-Agustus) dengan jumlah KPM mencapai 1547.

Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp. 200.000 setiap bulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana pengertian dari Creswell (2009), menyelidiki dan memahami pentingnya perilaku individu dan kelompok dengan mengacu pada isu-isu sosial atau kemanusiaan merupakan fokus penelitian kualitatif (Sugiyono, 2022).

Studi kasus ini dilakukan secara langsung terhadap Dinas Sosial Kota Palembang, serta masyarakat yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Gandus.

Cara penulis mengumpulkan data untuk kajian ini melalui, data primer dan data sekunder. Kajian ini memakai teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam kajian ini, mengacu pada pendekatan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam (Nuraeni et al., 2020) yang terdiri dari *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan Kesimpulan).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Karena hasil wawancara yang mandalam dengan melakukan observasi langsung berpedoman dengan teori implementasi David C Korten (1988) yaitu indikator program (*output* dan tugas), pemanfaat (tuntutan dan kebutuhan) dan organisasi (putusan dan kompetensi).

Program

a. *Output*

Pada sub indikator ini penelitian melakukan 2 cara pengambilan informasi yaitu dengan wawancara kepada pihak terkait maupun kuisisioner yang disebarkan melalui *Google Form* untuk apa yang didapatkan atau hasil dari program ini, apakah implementasi dari program BPNT berjalan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa hasil atau pencapaian program ini berjalan dengan baik. seperti dengan adanya penyaluran bantuan Rp.400.000 setiap 2 bulan sekali ataupun bantuan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan pada program, sehingga penerima dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Hasil Kuisisioner Pada Sub Indikator *Output*

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Saya menerima BPNT tepat waktu setiap bulannya	40%	46%	8%	6%	-	100% (50 responden)
2	Kualitas barang yang saya terima dari BPNT baik	38%	50%	12%	-	-	100% (50 responden)
3	Jumlah bantuan yang saya terima sesuai dengan yang dijanjikan dalam program BPNT	40%	46%	14%	-	-	100% (50 responden)

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan data tabel hasil kuisisioner diatas dapat dilihat bahwa penerimaan bantuan disalurkan tepat pada waktu setiap bulannya, yang Dimana bisa diliat ada 86% dari 50 responden setuju bahwa bantuan disalurkan secara tepat waktu walau masih ada responden yang tidak setuju terhadap tepat waktunya penyaluran program BPNT di kecamatan Gandus. Selanjutnya pada pernyataan ke 2 dapat dilihat ada 88% dari 50 responden yang menyatakan setuju sehingga dapat dikatakan kualitas barang yang didapatkan sangat baik untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Kemudian yang terakhir pada pertanyaan ke 3 dari indikator *output* ini, ada 86% orang yang setuju dari 50 responden dan 14% yang bersikap netral sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah bantuan yang diterima sesuai yang dijanjikan pada program BPNT.

Dari hasil wawancara dan hasil kuisisioner yang telah peneliti lakukan di kecamatan Gandus, peneliti menyimpulkan bahwa pada sub indikator *output* didapatkan bahwasanya hasil penelitian pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Gandus berjalan dengan sangat baik. Bantuan disalurkan tepat waktu, dalam kondisi yang baik, mudah digunakan, dan sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Program ini berhasil memenuhi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Gandus.

b. Tugas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa program BPNT di Kecamatan Gandus sudah optimal namun perlu mewaspadai adanya kendala seperti perbedaan identitas antara penerima dengan data yang ada pada Kementerian Sosial. Hal ini juga melibatkan serangkaian tugas yang penting seperti evaluasi terhadap status penerima manfaat oleh Dinas Sosial yang mana dapat memastikan bantuan disalurkan pada orang yang membutuhkan dengan tepat.

Dalam hal ini, kolaborasi dan koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping BPNT dan pihak-pihak yang terkait dapat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah yang akan terjadi nantinya pada program BPNT ini dan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas pada pelaksanaan program ini, sehingga memastikan bantuan tepat sasaran dan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemanfaat

a. Tuntutan

Dalam Hal ini tuntutan adalah Upaya atau kebutuhan yang diharapkan oleh pemanfaat dari organisasi pelaksana program. Indikator ini juha menjadi dasar agar dapat menentukan tugas dari organisasi dalam menjalankan program BPNT di kecamatan gandus ini.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa BPNT telah memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap keluarga dari penghasilan yang kurang dari kata cukup. Dengan adanya bantuan ini, keluarga mampu mencukupi bahan pangan atau pokok yang berkualitas agar gizi dari keluarga mereka menjadi lebih baik. Bantuan ini dapat dikatakan berhasil memenuhi tuntutan masyarakat kurang mampu.

Hasil Kuisioner Pada Sub Indikator Tuntutan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	BPNT telah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga saya	40%	44%	12%	2%	2%	100% (50 responden)
2	Ada perubahan positif dalam kesejahteraan keluarga saya sejak menerima BPNT	36%	44%	20%	-	-	100% (50 responden)

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan pada data hasil kuisioner yang telah didapatkan dari 50 responden, peneliti menyimpulkan bahwa ada 88% yang setuju dan 4% yang tidak setuju. Dari sini didapatkan bahwasanya program BPNT ini telah membantu dalam menyejahterakan keluarga mereka. Namun, organisasi pelaksana perlu memperhatikannya lagi karena masih ada beberapa keluarga yang masih memerlukan perhatian lebih agar dapat menyejahterakan keluarga mereka. Selanjutnya pertanyaan ke 2 dari sub indikator tuntutan yaitu, ada 80% orang setuju dan 20% orang bersikap netral sehingga dapat disimpulkan bahwa program BPNT ini memberikan dampak positif terhadap keluarga penerima BPNT yang dimana mereka mengalami peningkatan kesejahteraan setelah menerima BPNT.

Dari hasil wawancara dan hasil kuisioner yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulannya bahwa tuntutan yang diinginkan oleh Masyarakat cukup terpenuhi yang dapat dilihat dari dampak positif BPNT ini dalam menyejahterakan keluarga dari penghasilan yang tidak stabil terhadap tuntutan Masyarakat. Walaupun, telah cukup terpenuhi namun masih ada beberapa Masyarakat yang menyatakan bahwa BPNT tidak menyejahterakan keluarganya sehingga organisasi pelaksana dapat mengevaluasi bahwa program ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Kebutuhan

Kebutuhan mengacu pada seberapa relevan bantuan yang telah disalurkan dengan kebutuhan dari penerima bantuan pada program BPNT. Sub

indikator kebutuhan ini sangatlah penting untuk program BPNT ini dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk membantu meringankan kebutuhan dasar penerima bantuan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak pihak terkait dan penerima bantuan pangan non tunai ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan dari penerima bantuan dapat terpenuhi karena bantuan yang diterima dialokasikan ke hal-hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat butuhkan. Namun, masih ada beberapa penerima yang mengeluhkan sedikitnya uang atau bantuan yang diterima.

Hasil Kuisisioner Pada Sub Indikator Kebutuhan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Total
1	Saya sering menggunakan BPNT untuk membeli kebutuhan pangan	40%	46%	14%	-	-	100% (50 responden)
2	Harga bantuan pangan yang diterima sesuai dengan standar kebutuhan	32%	50%	14%	4%	-	100% (50 responden)
3	BPNT dapat membantu keluarga saya memenuhi pangan yang lebih baik dan bergizi	48%	36%	14%	2%	-	100% (50 responden)

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan pada data hasil kuisisioner yang telah didapatkan melalui 50 responden, peneliti menyimpulkan pada pertanyaan pertama yang mana mempertanyakan penggunaan BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mana didapatkan 86% dari 50 responden setuju dan 14 bersikap netral sehingga dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan sering mengalokasikan bantuannya ke kebutuhan dasar keluarga mereka. Selanjutnya pada pertanyaan ke 2 pada sub indikator kebutuhan yang mana didapatkan 82% setuju, 14% bersikap netral dan 4% tidak setuju sehingga dari sini didapatkan Kesimpulan bahwa harga bantuan cukup dapat diterima masyarakat. Namun masih ada bantuan pangan yang harganya tidak sesuai dengan standar harga yang mana pangan mengalami kenaikan sedangkan nominal bantuan tetap dan sedikit. Kemudian pertanyaan terakhir pada sub indikator kebutuhan yang mana mendapatkan 84% setuju, 14% bersikap netral dan 2% orang tidak setuju sehingga dari sini peneliti menyimpulkan bahwa program BPNT ini dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima yang diman bantuan ini memungkinkan pembelian sembako seperti beras, daging, ikan dan buah-buahan tanpa potongan harga yang biasa terjadi. Masyarakat juga setuju bahwa bantuan ini dapat memperbaiki gizi dan kestabilan keuangan keluarga penerima.

Berdasarkan wawancara dan hasil kuisisioner dari 50 responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) secara umum dapat memenuhi kebutuhan dasar penerima. Mayoritas penerima bantuan mengalokasikan bantuan tersebut untuk kebutuhan pangan keluarga mereka. Sebanyak 86% responden setuju bahwa BPNT membantu memenuhi kebutuhan pangan, 82% setuju bahwa harga bantuan cukup dapat diterima, dan 84% setuju bahwa program ini memungkinkan pembelian sembako tanpa potongan harga, sehingga memperbaiki gizi dan kestabilan keuangan keluarga penerima. Meskipun begitu, ada beberapa keluhan terkait jumlah bantuan yang masih

dianggap kurang dan harga pangan yang terkadang tidak sesuai dengan standar.

Organisasi

a. Putusan

Putusan merujuk pada keputusan yang diambil oleh organisasi pelaksana pada proses implementasi, putusan ini juga terkait mencakup strategi, kebijakan dan Tindakan yang ditetapkan agar program BPNT ini berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada organisasi terkait bahwa setiap keputusan terkait tugas dan seleksi penerima BPNT ini ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari hal ini dapat disimpulkan putusan yang telah dilakukan Kemensos terencana dengan sangat baik, baik dalam proses pendataan yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Sosial hingga sampai hasil atau keluaran program BPNT ini berjalan dengan sangat baik.

Pada indikator ini dapat dilihat bahwa Dinas Sosial hanya berperan sebagai pengawas dan pengevaluasi program maupun memasitkan program berjalan dengan tepat, seharusnya lebih baik dinsos dari setiap kota maupun provinsi dapat diberikan wewenang yang lebih luas agar lebih mudah dalam penentuan masyarakat yang memang perlu Bantuan Pangan Non Tunai ini.

b. Kompetensi

Kompetensi ini mengacu pada kemampuan organisasi dan kapasitas organisasi dalam melaksanakan program BPNT. Ini mencakup pada keterampilan, sumber daya dan kapabilitasn organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada sub indikator kompetensi didapatkan bahwa organisasi seperti Dinas Sosial hanya memiliki fungsi sebagai pengawas dan menampung keluhan masyarakat atas program BPNT tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kompetensi organisasi masih kurang dikarenakan Kementrian sosial itu sendiri masih mengalami kendala yang signifikan seperti data yang ada pada mereka tidak konsisten dalam penerima bantuan, sehingga dari sini perlu adanya dinsos yang lebih tau tentang kota Palembang terhadap masyarakat miskin.

Akibat adanya keterbatasan yang terjadi pada Dinas Sosial dalam memberikan bantuan yang hanya memungkinkan menampung dan membantu menginput data sehingga adanyak kesenjangan akibat data yang tidak konsisten yang dimana masyarakat lebih mampu mendapatkan bantuan sementara yang seharusnya membutuhkannya tidak dapat. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi dan pengawasan bantuan yang hanya dipegang oleh Kementerian Sosial.

Dari sini diperlukan adanya penguatan verifikasi seperti Dinsos bisa memberikan verifikasi atau mengajukan penerima bantuan yang mana hal ini dapat memvalidasi penerima dengan lebih efektif dan transparansi yang lebih baik. Dengan perbaikan ini program BPNT diharapkan berjalan tepat sasaran dan lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, dan menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan. Program BPNT berhasil memenuhi tujuan utama dengan menyalurkan bantuan tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai jumlah yang dijanjikan. Pelaksanaan program sudah optimal namun masih terdapat kendala seperti perbedaan identitas antara penerima dengan data Kementerian Sosial. BPNT memberikan kontribusi positif dalam menyejahterakan keluarga dengan penghasilan rendah, meskipun masih ada beberapa keluarga yang memerlukan perhatian lebih. Bantuan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi masih ada keluhan terkait jumlah bantuan yang dianggap kurang dan harga pangan yang tidak sesuai dengan standar.

Keputusan yang diambil oleh Kementerian Sosial dalam proses implementasi BPNT berjalan dengan baik, dengan Dinas Sosial berperan sebagai pengawas dan pengevaluasi program. Namun, diperlukan wewenang lebih luas untuk memudahkan penentuan penerima bantuan yang tepat. Keterbatasan dalam kapasitas organisasi dinas sosial menyebabkan adanya kesenjangan dalam sistem distribusi bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi dan validasi penerima bantuan oleh Dinas Sosial untuk memastikan program BPNT berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, implementasi BPNT di Kecamatan Gandus telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun masih perlu perbaikan dalam beberapa aspek agar bantuan dapat tersalurkan lebih efektif dan tepat sasaran.

REFERENSI

Book

Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.

Jurnal

Albades, R., & Roza, D. (2023). *Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada Masyarakat dalam Upaya Mengatasi Dampak Pandemi di Kecamatan Linggo Sari Baganti*. 6(2), 5371–5379.

Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>

Arfah, T. arfah. (2020). Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika*, 3(2), 24–35. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>

Arifin, F. A. M., Herman, M., & Malawat, S. H. (2020). ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA(KKS) DIKELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR. *EPrints UNISKA*, 1–9.

Dwi, Y. B., & Adhi, S. (2019). Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan

- Anak Di Kota Semarang (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Bp3Akb) Melalui Bapermas Per Dankbkota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2).
- Fadlurrohimi, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share : Social Work Journal*, 9(2), 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Lestari, W., Brata, A. S., Anhar, A., & Rahmawati, S. (2023). Analisis Autokorelasi Spasial Global dan Lokal Pada Data Kemiskinan Provinsi Bali. *Jambura Journal of Mathematics*, 5(1), 218-229. <https://doi.org/10.34312/jjom.v5i1.18681>
- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera. *Pilar*, 11(2), 1-14.
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151-158. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.7>
- Nuraeni, D., Azwar Uswatun, D., & Nurashiah, I. (2020). Analisis Pemahaman Kognitif Matematika Materi Sudut Menggunakan Video Pembelajaran Matematika Sistem Daring Di Kelas Iv B Sdn Pintukisi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, V(Vol 5 No 1 June 2020), 61-75. <https://doi.org/10.23969/jp.v5i1.2915>
- Nurafia, A., Yulianti, R., & Arenawati, A. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 4(2), 780-792. <https://doi.org/10.31506/jipags.v4i2.8709>
- Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5684-5690. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2122>
- Pratiwi, R., Isabella, I., Kencana, N., & Romli, H. (2022). Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) (Studi Pada Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 47-55. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1998>
- Syaputra, E. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8(3), 3034.